



ISSN 2621- 458X

**Implementation of the Inappropriate Housing Assistance Program for Low-Income Communities in Tanete Riaja Subdistrict, Barru Regency**

**Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni untuk Komunitas Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru**

*Wahyul AZ  
STIA Al Gazali Barru  
wahyul@algazali.ac.id*

**ABSTRACT**

This study explores the implementation of the Uninhabitable House Assistance Program (RTLH) for low-income communities in Tanete Riaja District, Barru Regency. The objective of this research is to evaluate the effectiveness of the program's implementation and its impact on the beneficiaries' quality of life. A qualitative research method was used, involving data collection through observations, in-depth interviews, and documentation. The findings indicate that the RTLH program has made a positive contribution to improving housing conditions and the welfare of low-income communities in the area. However, there are challenges in implementation, including delays in material delivery and budget constraints. The study concludes with recommendations for enhanced coordination and monitoring to address these issues and ensure the program's effectiveness.

**Keywords:** RTLH Assistance Program, Housing Quality, Low-Income Communities.



lisensi CC BY

## ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk masyarakat kurang mampu di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program serta dampaknya terhadap kualitas hidup penerima manfaat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program RTLH memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kondisi perumahan dan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di daerah tersebut. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi, termasuk keterlambatan pengiriman bahan bangunan dan keterbatasan anggaran. Kesimpulan penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi dan pemantauan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan memastikan efektivitas program.

**Kata Kunci:** Program Bantuan RTLH, Kualitas Perumahan, Masyarakat Kurang Mampu.

### A. PENDAHULUAN

Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah salah satu inisiatif pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu dengan menyediakan bantuan renovasi rumah yang tidak memenuhi standar layak huni. Di Indonesia, permasalahan perumahan yang tidak layak huni merupakan isu yang signifikan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Kecamatan Tanete Riaja di Kabupaten Barru merupakan salah satu wilayah yang menjadi fokus dari program ini, mengingat adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kondisi perumahan bagi masyarakatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan program RTLH di Kecamatan Tanete Riaja, dengan fokus pada efektivitas implementasi program serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Implementasi program ini melibatkan berbagai aspek, termasuk perencanaan, pengalokasian anggaran, distribusi bantuan, dan pemantauan lapangan. Evaluasi terhadap aspek-aspek ini penting untuk memahami sejauh mana program tersebut berhasil dalam meningkatkan kondisi perumahan dan kualitas hidup masyarakat kurang mampu.

Meskipun program RTLH memiliki tujuan yang jelas dan manfaat yang signifikan, pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterlambatan dalam

pengiriman bahan bangunan, keterbatasan dana, dan kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, serta studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai implementasi program RTLH di Kecamatan Tanete Riaja dan memberikan kontribusi untuk perbaikan program serupa di masa depan.

Menurut Edward III dalam Suko Wahyono, dkk (2019: 6-7) bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu :

a. Komunikasi

Keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

#### d. Struktur Birokrasi

Yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP.

Berdasarkan uraian diatas maka untuk mengetahui bagaimana implementasi program bantuan rumah layak tidak huni (RLTH) terhadap masyarakat kurang mampu di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru digunakan indikator yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Dan Struktur Birokrasi.

Kemiskinan adalah keadaan dimana manusia, orang, keluarga, kelompok, atau masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yang layak bagi kemanusiaan seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan atau interaksi sosial. Fenomena kemiskinan di Indonesia menurut Mujiyadi et al ( 2007 ).

Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang masih mengeluh dan merasa kecewa karena mereka merasa telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan dari program tersebut tapi kenyataannya hanya orang- orang yang tertentu yang mempunyai koneksi yang mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni. Selain hal tersebut peneliti juga menemukan permasalahan- permasalahan lain terkait penerimaan dan persyaratan dalam program bantuan rumah Tidak layak huni harus memiliki tanah sendiri sehingga terlaksananya pembangunan rumah padahal masyarakat sekitar yang kurang mampu tidak memiliki tanah untuk pembangunan rumah apalagi harga tanah yang semakin tinggi, dan sebagian di tempat yang terpencil yang terletak di Kecamatan Tanete Riaja masih ada beberapa masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan bantuan program Rumah layak Huni tersebut padahal kondisi rumah mereka sudah tidak layak untuk dihuni.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana “Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

**B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada masyarakat kurang mampu di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Jenis Penelitian Penelitian ini adalah studi kualitatif yang bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam pelaksanaan program RTLH, serta mengidentifikasi tantangan dan dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendetail mengenai proses dan hasil program.



**Gambar 1** Diagram Alir Penelitian

Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni untuk Komunitas Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Hasil Penelitian**

**Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Tanete Riaja**

Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah inisiatif pemberdayaan sosial yang bertujuan untuk menciptakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin dengan memberikan bantuan perbaikan rumah. Untuk menilai implementasi program ini di Kecamatan Tanete Riaja, peneliti menggunakan kerangka Edward III, yang mencakup empat faktor utama: Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, dan Disposisi. Penelitian dilakukan melalui observasi dan wawancara pada 19 hingga 21 Oktober 2023.

#### a. Komunikasi

Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten agar semua pihak memahami standar dan tujuan kebijakan dengan jelas. Dalam program RTLH di Kecamatan Tanete Riaja, beberapa informan memberikan wawancara sebagai berikut:

- 1) **Informan A** menyatakan bahwa sosialisasi program RTLH tidak dilakukan di tingkat kecamatan karena pelaksanaan program berada di bawah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau relawan politik lainnya. Data warga yang tidak layak huni dikumpulkan oleh perangkat desa. (Wawancara, 19 Oktober 2023).
- 2) **Informan B** menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan dengan kecamatan, kelurahan, staf desa, dan masyarakat. Data yang terkumpul kemudian diteruskan ke pemerintah pusat melalui BSPS untuk memproses prosedur pelaksanaan. (Wawancara, 20 Oktober 2023).
- 3) **Informan C** melaporkan bahwa mereka mengetahui adanya program RTLH dari kunjungan survei dan permintaan berkas. (Wawancara, 21 November 2023).

Kesimpulan dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa informasi tentang program RTLH di Kecamatan Tanete Riaja sudah diterima baik oleh masyarakat meskipun sosialisasi tidak dilakukan secara luas.

#### b. Sumber Daya

Sumber daya yang memadai sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. Ini meliputi sumber daya manusia dan dana.

- 1) **Sumber Daya Manusia (SDM):**

- **Informan D** menyebutkan bahwa SDM dalam program ini melibatkan pihak desa dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan. (Wawancara, 19 Oktober 2023).
- **Informan E** menambahkan bahwa SDM melibatkan BSPS, kecamatan, kelurahan, kepala lingkungan, dan masyarakat, dengan masing-masing pihak memiliki tugas yang spesifik. (Wawancara, 20 Oktober 2023).

Masyarakat penerima bantuan juga melaporkan adanya petugas yang datang untuk melakukan survei dan pemotretan rumah mereka. (Wawancara, 21 Oktober 2023).

Kesimpulan: Koordinasi SDM dilaksanakan dengan baik, meskipun jumlah pendamping terbatas.

## 2) Sumber Dana:

- **Informan A** menjelaskan bahwa dana untuk program RTLH bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUKPR) melalui BPS. Kecamatannya tidak memiliki anggaran khusus untuk bedah rumah. (Wawancara, 19 Oktober 2023).
- **Informan E** mengonfirmasi bahwa dana berasal dari BPS. (Wawancara, 20 Oktober 2023).

Masyarakat penerima bantuan juga mengungkapkan bahwa mereka harus mengeluarkan dana tambahan untuk tenaga kerja dan biaya lainnya karena bantuan yang diterima berbentuk barang. (Wawancara, 21 Oktober 2023).

Kesimpulan: Dana dari BPS belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan rumah, menyebabkan masyarakat harus menambah biaya sendiri.

## c. Disposisi (Sikap)

Disposisi pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi efektivitas implementasi. Sikap positif dan dukungan terhadap kebijakan dapat meningkatkan keberhasilan program.

- **Informan C** memberikan penilaian positif terhadap program RTLH dan berharap agar pelaksanaan program semakin baik dan tepat sasaran di masa depan. (Wawancara, 20 Oktober 2023).

Namun, ada juga keluhan tentang pemilihan penerima bantuan yang tidak merata. (Wawancara, 20 Oktober 2023).

Kesimpulan: Secara umum, sikap pelaksana dan masyarakat terhadap program RTLH adalah positif, tetapi masih ada kebutuhan untuk memperbaiki distribusi bantuan agar lebih adil.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mendukung pelaksanaan program melalui pembagian tugas dan kewenangan yang jelas.

- **Informan D** menyebutkan bahwa BSPS harus memiliki target dan mensosialisasikan program RTLH di kecamatan. (Wawancara, 19 Oktober 2023).
- **Informan E** menjelaskan bahwa berkas administrasi diproses mulai dari permohonan hingga kelengkapan sesuai dengan peraturan. (Wawancara, 20 Oktober 2023).

Kesimpulan: Struktur birokrasi yang ada sudah memadai untuk pelaksanaan program RTLH, dengan proses administrasi yang diatur secara sistematis.

Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Tanete Riaja

Dalam pelaksanaan program RTLH, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitasnya:

##### 1) **Kurangnya Anggaran:**

- **Informan C** mengungkapkan bahwa kekurangan dana sering menjadi kendala utama, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki tabungan tambahan. (Wawancara, 21 Oktober 2023).

Kesimpulan: Anggaran bantuan belum mencukupi kebutuhan penuh, menyebabkan masyarakat harus menambah biaya sendiri.

##### 2) **Ketidaktepatan Waktu:**

- **Informan E** melaporkan keterlambatan bahan bangunan dan faktor cuaca sebagai hambatan dalam proses pembangunan. (Wawancara, 20 Oktober 2023).
- **Informan C** menambahkan bahwa keterbatasan tenaga kerja juga mempengaruhi ketepatan waktu. (Wawancara, 21 Oktober 2023).

Kesimpulan: Waktu pelaksanaan sering terganggu oleh faktor eksternal, mempengaruhi kelancaran proyek.

### 3) **Status Kepemilikan Rumah/Tanah:**

- **Informan E** menyebutkan bahwa salah satu syarat bantuan adalah memiliki surat hak milik tanah, yang menjadi kendala bagi beberapa calon penerima bantuan. (Wawancara, 20 Oktober 2023).

Kesimpulan: Masalah kepemilikan tanah menghambat beberapa masyarakat dalam mendapatkan bantuan RTLH.

### 4) **Komunikasi:**

- **Informan C** mengeluhkan bahwa informasi mengenai program RTLH tidak tersebar dengan baik, membuat banyak masyarakat tidak mengetahui tentang program ini. (Wawancara, 21 Oktober 2023).

Kesimpulan: Komunikasi mengenai program RTLH perlu diperbaiki agar informasi dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program RTLH di Kecamatan Tanete Riaja telah mencapai beberapa keberhasilan, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan cakupan program di masa depan.

## 2. **Pembahasan**

### 1) **Komunikasi**

Dalam implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Tanete Riaja, komunikasi merupakan faktor yang sangat krusial. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa sosialisasi program RTLH belum dilakukan secara menyeluruh di tingkat kecamatan. Informasi tentang program ini sebagian besar

didapatkan melalui kunjungan survei dari pihak ketiga, seperti BSPS dan relawan politik, serta perangkat desa. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam komunikasi yang sistematis mengenai program kepada seluruh masyarakat yang berpotensi menerima manfaat.

Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan memiliki pemahaman yang sama mengenai standar dan tujuan kebijakan. Jika informasi tidak disebarluaskan secara luas, akan ada kesenjangan pemahaman yang dapat menghambat pelaksanaan program. Dalam hal ini, penting untuk meningkatkan strategi komunikasi agar lebih inklusif, memastikan bahwa semua warga tahu tentang program dan proses yang harus dilalui untuk mendapatkan bantuan.

## **2) Sumber Daya**

### **a. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pelaksanaan program RTLH melibatkan berbagai pihak, termasuk BSPS, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat. Koordinasi antara pihak-pihak ini telah berjalan dengan baik, namun jumlah pendamping yang terbatas menjadi tantangan. Ketergantungan pada sejumlah kecil pendamping dapat memperlambat proses, terutama jika mereka harus menangani banyak kasus sekaligus.

Ketersediaan SDM yang memadai dan berkualitas adalah hal yang penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif. Dengan struktur yang ada, meskipun sudah ada koordinasi yang baik, jumlah pendamping yang terbatas dapat menjadi kendala dalam pengelolaan program yang lebih luas.

### **b. Sumber Dana**

Sumber dana untuk program RTLH berasal dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Meskipun dana ini sudah ada, kenyataannya dana tersebut sering kali tidak mencukupi seluruh biaya yang diperlukan oleh penerima manfaat, memaksa mereka untuk mengeluarkan biaya tambahan sendiri.

Dalam hal ini, ada kebutuhan untuk meninjau kembali besaran dana yang diberikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Dana yang lebih

memadai akan mengurangi beban tambahan pada masyarakat dan memastikan bahwa program dapat dilaksanakan dengan lebih lancar.

### 3) Disposisi (Sikap)

Sikap pelaksana dan masyarakat terhadap program RTLH umumnya positif. Dukungan terhadap pelaksanaan program dapat terlihat dari bagaimana para implementor dan pengawas bekerja untuk memastikan program berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Namun, ada juga keluhan tentang ketidakadilan dalam distribusi bantuan, di mana beberapa orang merasa bahwa bantuan lebih banyak diberikan kepada kenalan atau keluarga.

Penting untuk mengatasi isu-isu terkait keadilan distribusi bantuan agar program ini benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Melakukan evaluasi dan audit yang ketat dapat membantu memastikan bahwa bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan yang objektif dan kriteria yang telah ditetapkan.

### 4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi program RTLH di Kecamatan Tanete Riaja tampaknya cukup memadai. Proses administrasi yang melibatkan perangkat desa, kecamatan, dan BPS menunjukkan adanya sistem yang terorganisir dengan baik. Namun, memastikan bahwa semua berkas dan proses administrasi dikelola dengan efisien tetap menjadi tantangan penting.

Adanya struktur birokrasi yang jelas dan prosedur administrasi yang baik akan membantu dalam kelancaran pelaksanaan program. Peningkatan dalam hal ini bisa melibatkan pelatihan bagi petugas administrasi dan pembaharuan prosedur untuk mempercepat proses tanpa mengorbankan akurasi dan ketepatan.

## Faktor Penghambat

### a. Kurangnya Anggaran

Kurangnya anggaran merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan program RTLH. Bantuan yang diberikan sering kali tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan pembangunan, menyebabkan masyarakat harus menambah biaya dari kantong pribadi mereka. Ini menunjukkan perlunya penyesuaian dalam alokasi dana agar lebih sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya di lapangan.

### **b. Ketidaktepatan Waktu**

Masalah ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan program RTLH disebabkan oleh keterlambatan bahan bangunan dan faktor cuaca, serta keterbatasan tenaga kerja. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya perencanaan yang lebih baik dan penjadwalan yang fleksibel yang mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses pembangunan.

### **c. Status Kepemilikan Rumah/Tanah**

Kendala terkait status kepemilikan tanah juga menghambat beberapa masyarakat untuk mendapatkan bantuan. Hal ini menyoroti pentingnya memperhatikan dokumen kepemilikan tanah sebagai syarat utama dalam program bantuan. Solusi untuk masalah ini dapat melibatkan program pendampingan atau fasilitasi dalam pengurusan dokumen kepemilikan tanah bagi mereka yang belum memiliki.

### **d. Komunikasi**

Kurangnya komunikasi yang jelas dan menyeluruh mengenai program RTLH menyebabkan banyak masyarakat tidak mengetahui tentang bantuan yang tersedia. Untuk memperbaiki hal ini, strategi komunikasi yang lebih efektif dan inklusif harus diterapkan, seperti penyuluhan langsung ke masyarakat dan pemanfaatan media sosial atau publikasi lokal.

## **D. KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Tanete Riaja menunjukkan beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan. Namun, berbagai tantangan dan hambatan yang diidentifikasi memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut. Peningkatan dalam aspek komunikasi, alokasi dana, manajemen waktu, dan penanganan masalah kepemilikan tanah akan sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan cakupan program di masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agus, Purnanto Erwan Dan Dyah Ratih Sulistyashsti, 2015, Implementasi Kebijakan Publik. Gava Media, Yogyakarta.

- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2013, Metode Penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Harbani Pasolong , 2016, Metode Penelitian Administrasi Publik, Alfabeta CV, Bandung.
- Rambopandi , 2016, Kebijakan Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Rumah Layak Tidak Huni, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Salak.
- Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung. Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kombinasi, Alfabeta, Bandung.
- Sukandarrumidi, 2012, Metodologi Penelitian, Gadjadara University Press, Yogyakarta.
- Suwetha, I GustinNgurah, Muhammad Suhardi dan Ida Surya, 2020, Tuga Wewenang dan Tanggung Jawab Camat Di Era Ekonomi Daerah dan Perannya Menghadapi Tatanan Kehidupan New Normal, Pustaka Bangsa (Anggaran IKAPI), Mataram-NTB.
- Swadaya, 2016, Peningkatan Kualitas Rumah Layak Tidak Huni, Kementrian Pekerjaan Umum dan Pemilihan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah